



Judul : Waspada dengan jebakan utang
Tanggal : Selasa, 18 April 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung **Waspada Dengan Jebakan Utang**

ANGGOTA Komisi VI DPR Achmad Baidowi mendesak Pemerintah bersikap tegas terhadap atas permintaan China agar APBN menjadi penjamin pinjaman utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menurutnya, negosiasi penambahan utang KCJB sebesar Rp 8,3 triliun dengan pihak kreditur China perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini tengah memutar otak akibat bengkaknya biaya proyek atau *cost overrun* Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar 1,2 miliar dolar AS. China pun mematok bunga utang sebesar 3,4 persen jauh lebih tinggi dari harapan Pemerintah yakni 2 persen.

Baidowi menilai, kenaikan biaya konstruksi atau *cost overrun* terjadi akibat perencanaan proyek yang kurang matang. Jadi, selama proyek dijalankan terdapat kenaikan biaya bunga, biaya tenaga kerja, hingga biaya pembelian lahan.

“Kondisi tersebut seharusnya sudah tercermin pada saat uji kelayakan proyek dilakukan. Kesalahan dalam perencanaan, tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak BUMN dan pemerintah Indonesia,” ujar Awiek-sapaan Achmad Baidowi, kemarin.

Dia menegaskan, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara finansial memiliki masa pengembalian investasi yang cukup panjang dan dipastikan dapat memberikan risiko yang sangat besar bagi APBN. Untuk itu, Pemerintah mesti waspada terhadap skenario debt trap.

“Kami meminta Pemerintah waspada terhadap skenario jebakan utang. Proyek yang membebani BUMN dan

anggaran negara sengaja diciptakan dengan skenario tertentu oleh pihak kreditur, sehingga pengelolaan aset strategis nasional pindah ke tangan asing,” sambungnya.

Pihaknya juga menegaskan, penjamin utang dengan skema APBN bukan solusi ideal. Saat ini, APBN sedang mengejar target defisit wajib kembali ke bawah 3 persen sebelum 2024. Sementara belanja perlindungan sosial, pengendalian inflasi, belanja pendidikan dan belanja rutin wajib diprioritaskan pemerintah.

“Ruang fiskal jelas akan semakin tertekan jika utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijaminkan APBN, meski bentuknya penjaminan. Tetapi ada risiko APBN yang terlibat dalam pembayaran bunga dan cicilan pokok apabila konsorsium Kereta Cepat kesulitan pembayaran utang,” jelasnya.

Pemerintah mesti mendesak China agar komitmen dengan kesepakatan awal. Proyek Kereta Cepat awalnya adalah *Business to Business*, sehingga permasalahan pembengkakkan biaya selama proyek berjalan dapat diselesaikan dengan mekanisme bisnis.

“Bukan melibatkan APBN yang notabene hasil pungutan pajak masyarakat,” tegas dia.

Oleh karena itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut meminta Pemerintah menaikkan daya tawar terhadap pihak kreditur China dalam mencari jalan keluar utang Kereta Cepat. Pemerintah sebaiknya menawarkan penjaminan melalui aset Kereta Cepat atau pemisahan risiko di PT PII.

Menurutnya, masih banyak opsi rendah risiko dan tidak menimbulkan tekanan keuangan negara, khususnya ketika risiko gagal bayar tinggi. ■ KAL